

ANALISIS KONFLIK KARANG TALIWANG DAN MONJOK TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF TEORI LEWIS A COSER

Saskia Zulhijayanti Mazka¹, Arif Nasrullah², Farida Hilmi³

^{1,2,3}Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram
Email: saskiamazka@gmail.com

Abstract

Conflict is a social dynamic that cannot be avoided in community life, especially when differences arise. Lombok is one of the regions contributing to social conflicts in West Nusa Tenggara (NTB), particularly in the city of Mataram. Among the various social conflicts that have occurred in Mataram, one of the most prominent and long-lasting is the conflict between the Karang Taliwang and Monjok communities. This conflict began in 2015 and was only fully resolved in 2023. This study uses Lewis A. Coser's sociological theory of conflict and employs a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques include non-participant observation, in-depth interviews, and documentation. The purpose of this study is to identify the underlying factors behind the prolonged conflict between the two communities and to analyze the impacts that emerged after the 2023 conflict. According to Lewis A. Coser's theory, conflict is divided into two types: realistic conflict, which arises from dissatisfaction with law enforcement and community disappointment, and non-realistic conflict, which is emotional and political in nature due to the actions of certain individuals. These include the emergence of phenomena such as "Taliwang phobia" and "Monjok phobia." The main causes of the conflict include long-standing grudges, juvenile delinquency, and political exploitation in the period leading up to the election. The post-conflict impacts are divided into two categories. The negative impacts include economic disruption, psychological trauma, damage to public facilities, casualties, the breakdown of social relations, and the weakening of social values and norms. Meanwhile, the positive impacts include increased group solidarity, the formation of new associations, the establishment of sports communities, and heightened social awareness. The 2023 conflict resolution, conducted through mediation, deliberation, peace agreements, and sports community activities, functioned as a social safety net that enabled both parties to reach a mutual peace agreement. This agreement officially marked the end of the conflict that had begun in 2015.

Keywords: Conflict, Conflict Factors, Conflict Impacts

Abstrak

Konflik merupakan suatu dinamika sosial yang tidak dapat di hindari dalam kehidupan bermasyarakat terutama jika terjadi perbedaan. Lombok menjadi salah satu daerah penyumbang konflik di NTB, terutama di Kota Mataram. Dari berbagai konflik sosial yang pernah terjadi di Mataram, terdapat satu konflik yang cukup menonjol dan berlangsung lama, yaitu konflik antara masyarakat Karang Taliwang dan Monjok. Konflik ini mulai terjadi pada tahun 2015 dan baru benar-benar berakhir pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan teori sosiologi konflik Lewis A Coser. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi non-partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik berkelanjutan antara kedua wilayah serta menganalisis dampak yang muncul pascakonflik tahun 2023. Hasil penelitian berdasarkan teori Lewis A. Coser, konflik terbagi menjadi dua jenis, yaitu konflik realistik yang timbul karena ketidakpuasan terhadap aparat hukum dan kekecewaan masyarakat, serta konflik non-realistik yang bersifat emosional dan politis akibat ulah oknum, termasuk

munculnya fenomena “Taliwang phobia” dan “Monjok phobia”. Faktor penyebab utama konflik meliputi dendam lama, kenakalan remaja, dan politik yang dimanfaatkan menjelang pemilu. Dampak pascakonflik terbagi dua, yaitu dampak negatif meliputi terganggunya ekonomi, trauma psikologis, lumpuhnya fasilitas umum, jatuhnya korban, retaknya hubungan sosial, serta terancamnya nilai dan norma sosial. Dampak positif meliputi meningkatnya solidaritas kelompok, terbentuknya paguyuban baru, terciptanya komunitas olahraga, serta meningkatnya kesadaran sosial. Resolusi pada 2023 melalui mediasi, musyawarah, perjanjian damai, dan kegiatan komunitas olahraga sebagai katup penyelamat, sehingga kedua belah pihak sepakat berdamai. Kesepakatan ini menjadi akhir perseteruan sejak 2015.

Kata Kunci: Konflik, Faktor Konflik, Dampak Konflik

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, bahasa, budaya, adat istiadat, agama, dan pandangan politik. Namun, di balik keragaman tersebut, potensi terjadinya perpecahan dan konflik sosial juga tinggi. Konflik muncul sebagai hasil interaksi sosial yang dipicu oleh perbedaan kepentingan, nilai, atau identitas antarindividu dan kelompok. Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada tahun 2018–2019 tercatat 71 peristiwa konflik sosial di berbagai provinsi, yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, Data Potensi Desa (Podes) 2018 menunjukkan sekitar 3.150 desa atau 3,75% dari total 84.000 desa di Indonesia tergolong rawan konflik sosial (Media Indonesia, 2020).

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, dan agama, dengan tiga etnis utama yaitu suku Sasak, Samawa, dan Mbojo. Provinsi ini terletak di bagian tengah Nusa Tenggara, diapit oleh Provinsi Bali di sebelah barat dan Nusa Tenggara Timur di sebelah timur, dengan Kota Mataram sebagai ibu kota. NTB terdiri atas delapan kabupaten dan dua kota. Keberagaman tersebut menjadikan NTB berpotensi menghadapi tantangan dalam bentuk konflik sosial (Wikipedia, 2024).

Berdasarkan data NTB Satu Data, jumlah konflik sosial di provinsi ini menurun dari 43 kasus pada tahun 2014 menjadi 4 kasus Kepulauan pada tahun 2021 (NTB Satu Data, 2021). Namun, menurut laporan Antara NTB (2024), potensi kerawanan konflik masih muncul, terutama saat momentum politik seperti pemilu, misalnya di wilayah Sumbawa (Antara NTB, 2024).

Konflik di Nusa Tenggara Barat (NTB) umumnya dipicu oleh ketidakadilan ekonomi, perbedaan budaya, serta kurangnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial secara keseluruhan. Lombok, khususnya Kota Mataram, menjadi salah satu wilayah dengan tingkat konflik yang cukup tinggi. Dari segi geografis,

sosial, dan budaya, Kota Mataram memiliki karakteristik yang menarik untuk diteliti karena kerap mengalami konflik baik bernuansa agama maupun sosial. Konflik tersebut sering disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan pandangan antar kelompok masyarakat (Kumbara et al., 2000). Di antara berbagai konflik sosial yang terjadi, salah satu yang bersifat berkelanjutan adalah konflik antara masyarakat Monjok dan Karang Taliwang.

Karang Taliwang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini dihuni oleh tiga etnis besar di Pulau Lombok, yaitu etnis Bali, Sasak, dan Sumbawa. Berdasarkan kajian sejarah, masyarakat Karang Taliwang berasal dari keturunan Kerajaan Taliwang Tengah Dalam di Sumbawa Barat yang berdiri sejak abad ke-13. Sejarah mencatat bahwa pada abad ke-14 hingga ke-17 terjadi peperangan antara Kerajaan Karang Asam (Bali) dan Kerajaan Selaparang (Lombok). Dalam peristiwa tersebut, pasukan dan putra mahkota Karang Asam melarikan diri ke Lombok dan kemudian menetap di daerah Cakranegara (Serambinews, 2011). Secara linguistik, masyarakat Karang Taliwang menggunakan bahasa Sasak, bahasa Indonesia, serta campuran bahasa Taliwang (Sumbawa) dan Sasak (Lombok), yang membedakan mereka dari masyarakat Lombok lainnya (Sudarma et al., 2014). Sepanjang waktu, wilayah ini kerap mengalami konflik yang dipicu oleh perbedaan budaya, etnis, dan pandangan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Karang Taliwang berpotensi mengalami konflik kembali apabila muncul pemicu dari salah satu kelompok masyarakat.

Kelurahan Monjok merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Wilayah ini dikenal sebagai daerah yang dihuni oleh suku asli Sasak, yaitu etnis mayoritas yang mendiami Pulau Lombok. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Monjok menggunakan bahasa Sasak sebagai alat komunikasi utama yang mencerminkan identitas budaya lokal. Secara sosial, Monjok merupakan kawasan yang dinamis dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi serta keberagaman sosial yang kompleks. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti kesenjangan ekonomi, lemahnya komunikasi antarkelompok masyarakat, serta rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Faktor-faktor ini menjadi pemicu munculnya konflik sosial di tengah masyarakat Monjok (Wikipedia, 2024). Berbagai konflik yang pernah terjadi di wilayah ini menunjukkan adanya ketegangan sosial yang berakar pada interaksi yang tidak seimbang antara kelompok masyarakat. Dari sekian banyak konflik sosial yang terjadi, salah satu yang paling menonjol dan berkelanjutan hingga tahun 2023 adalah konflik antara warga Kelurahan Monjok dan Kelurahan Karang Taliwang. Konflik ini menjadi

gambaran nyata bahwa ketegangan sosial di wilayah Monjok belum sepenuhnya mereda. Oleh karena itu, potensi munculnya kembali konflik serupa akan tetap ada, terutama apabila terdapat pihak-pihak yang memprovokasi atau memancing keributan di tengah masyarakat.

Konflik antara masyarakat Monjok dan Karang Taliwang bermula pada tahun 2015 akibat pemindahan kontainer sampah di dekat pemakaman warga Monjok oleh pihak Karang Taliwang, yang berujung pada bentrokan fisik dengan senjata tajam dan menimbulkan korban luka (Yaqinah, 2019). Ketegangan kembali memuncak pada Januari 2018 setelah terdengar suara ledakan petasan yang memicu bentrokan antarwarga dengan senjata tradisional (HarianNusa, 2018). Konflik serupa kembali terjadi pada Oktober 2023 akibat masalah pribadi yang meluas dan mengganggu aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat, hingga akhirnya diselesaikan melalui upaya perdamaian oleh kepolisian (NTBSatu, 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang melatarbelakangi kembali terjadinya konflik anantara kedua kelompok masyarakat tersebut dan melihat dampak apa saja yang dimbulkan pascakonflik pada tahun 2023 dengan menggunakan teori konflik sosial Lewis A Coser dengan judul penelitian “Analisis Konflik Karang Taliwang Dan Monjok Tahun 2023 Dalam Prespektif Teori Lewis A Coser”.

Konsep dan Teori

Teori Konflik Lewis A Coser

Teori konflik menurut Lewis A. Coser dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang bersifat fungsional dan banyak dipengaruhi oleh pemikiran George Simmel. Menurut Coser, konflik tidak hanya menimbulkan dampak negatif, tetapi juga dapat menghasilkan dampak positif bagi sistem sosial yang terlibat. Konflik dianggap sebagai bentuk interaksi sosial yang wajar dan tidak perlu dihindari, sebagaimana pendapat Simmel yang menyatakan bahwa konflik merupakan bentuk dasar interaksi sosial yang saling berkaitan dengan kerja sama dalam berbagai bentuk yang kompleks (Sutaryo, 1992: 42).

Coser menjelaskan bahwa konflik merupakan unsur penting dalam interaksi sosial dan tidak selalu bersifat merusak. Sebaliknya, konflik dapat memperkuat kohesi sosial, menumbuhkan solidaritas, serta mempererat hubungan antaranggota kelompok. Menghadapi musuh bersama, misalnya, dapat mengintegrasikan masyarakat, meningkatkan keterlibatan, serta mengurangi perselisihan internal (Sutaryo, 1992: 39). Lebih lanjut, Coser menyatakan bahwa konflik sosial memiliki dua dimensi utama positif dan negatif yang keduanya berperan

penting dalam dinamika kehidupan masyarakat. Konflik dapat berfungsi konstruktif untuk memperkuat dan mempertahankan struktur sosial yang ada. Ia mengemukakan empat peran utama konflik, yaitu memperkuat solidaritas internal, mencerminkan perbedaan kepentingan sosial, mendorong terbentuknya hubungan sosial baru, dan berperan sebagai mekanisme sosial yang dinamis (Dodi, L., 2017).

Coser membedakan dua tipe utama konflik, yaitu konflik realistik dan konflik nonrealistik. Konflik realistik muncul akibat kekecewaan terhadap tuntutan tertentu dalam hubungan sosial, yang berakar pada frustrasi karena harapan atau tujuan yang tidak terpenuhi serta keuntungan yang dianggap mengecewakan. Konflik ini juga dapat timbul dari keinginan untuk memperoleh sesuatu dan berfungsi sebagai sarana mencapai hasil tertentu yang diakui oleh budaya pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, konflik realistik dapat terjadi baik antarindividu maupun antarkelompok (Nursantari, A. R., 2018). Konflik non-realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan lebih bersifat emosional atau ideologis, seperti konflik antaragama, antaretnis, maupun antarkepercayaan. Jenis konflik ini berfungsi untuk menurunkan ketegangan atau mempertegas identitas suatu kelompok, meskipun sering kali melahirkan bentuk-bentuk kekerasan yang bersumber dari faktor lain.

Coser menegaskan bahwa dalam realitas sosial, kedua tipe konflik tersebut dapat muncul secara bersamaan dan saling memengaruhi, sehingga menghasilkan dinamika konflik yang lebih kompleks (Coser, 1957). Pada penelitian ini teori konflik Lewis A Coser digunakan untuk menganalisis berbagai pascakonflik, baik dampak negatif maupun dampak positif konflik tersebut. Selain itu, teori ini juga diterapkan untuk memahami konflik secara menyeluruh dengan mengkaji aspek konflik yang bersifat realistik dan non-realistik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang terlibat konflik secara langsung, pemerintah desa setempat, aparat keamanan dan Masyarakat yang berada di sekitar wilayah berkonflik. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi non-partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil dan Pembahasan

Konflik antara masyarakat Karang Taliwang dan Monjok di Kota Mataram merupakan peristiwa sosial yang menarik perhatian, karena kembali terjadi pada tahun 2023 dengan tingkat ketegangan yang cukup tinggi. Dari hasil observasi dan wawancara, muncul beberapa alasan yang menjadi faktor pemicu terulangnya konflik antara masyarakat Karang Taliwang dan Monjok pada tahun 2023, serta berbagai dampak yang dialami masyarakat pascakonflik. Temuan ini terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi kembali terjadinya konflik dan dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat pasca konflik yang terjadi di antara kedua masyarakat maupun masyarakat yang berada di sekitar wilayah konflik pada tahun 2023.

Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Konflik Keberlanjutan Antara Karang Taliwang dan Monjok

1. Faktor Dendam Lama

Konflik antara masyarakat Karang Taliwang dan Monjok terus berlanjut hingga tahun 2023, dipicu oleh dendam lama yang menimbulkan ketegangan dan memicu kerentanan konflik berulang. Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa adanya rasa saling curiga dan ketidakpercayaan didalam masyarakat yang telah berakar sejak lama memperkuat rawannya terjadi konflik di antara kedua kelompok ini. Akar permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh kejadian sesaat, tetapi juga terkait dengan sejarah dan dinamika sosial yang mempertahankan ketegangan antarwarga.

Dendam tersebut muncul karena bentrokan yang berulang dari tahun ke tahun dan menimbulkan banyaknya korban luka maupun korban jiwa. Setiap konflik menimbulkan luka fisik maupun psikologis, yang kemudian menumbuhkan keinginan untuk membalas dendam. Konflik juga menyebabkan korban jiwa dan luka akibat serangan senjata tajam dan senjata rakitan yang di gunakan pada saat konflik berlangsung. Kondisi ini memperdalam trauma sosial di masyarakat.

Sebagai langkah penanganan, pemerintah bersama kepolisian melaksanakan program trauma healing bagi anak-anak dan pelajar di wilayah terdampak guna memulihkan kondisi psikologis serta mencegah munculnya kembali ingatan konflik. Masyarakat dan aparat berharap konflik ini benar-benar berakhir, mengingat wilayah tersebut merupakan kawasan dengan fasilitas publik penting yang membutuhkan keamanan dan kedamaian (Antara News,2023)

2. Faktor Kenakalan Remaja

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa konflik antara masyarakat Karang Taliwang dan Monjok pada tahun 2023 banyak melibatkan remaja sebagai aktor utama. Permasalahan pribadi yang dipicu oleh perilaku menyimpang, seperti konsumsi minuman keras, narkoba, dan balap liar, berkembang menjadi bentrokan besar yang melibatkan masyarakat luas. Kasus penganiayaan dan perkelahian antar remaja menunjukkan bahwa kenakalan remaja sering menjadi pemicu awal konflik, masalah pribadi antar remaja tersebut yang kemudian meluas karena solidaritas kelompok dan sentimen antarwilayah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kenakalan remaja memiliki peran besar dalam memperburuk hubungan sosial dan mempertahankan siklus konflik di antara kedua masyarakat tersebut.

3. Faktor Politik

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2023, konflik sering terjadi bertepatan dengan masa pemilu, sehingga masyarakat meyakini adanya kepentingan politik di balik peristiwa tersebut. Oknum tertentu diduga memanfaatkan situasi politik untuk memperkeruh keadaan dan memprovokasi masyarakat. Keterlibatan beberapa tokoh politik dalam peristiwa konflik memperkuat indikasi adanya permainan politik di balik bentrokan. Seperti yang di beritakan oleh media bahwa eks anggota DPRD Mataram dan Ketua DPC PAN Cakranegara, diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polresta Mataram karena terekam berada di tengah massa aksi panah warga Karang Taliwang (Antara News, 2024). Perbedaan sosial dan budaya antara kedua kelompok juga mudah dimanfaatkan untuk menimbulkan perpecahan. Dengan demikian, faktor politik menjadi salah satu elemen yang memperkuat keberlanjutan konflik antara masyarakat Karang Taliwang dan Monjok.

Dampak Yang Di Timbulkan Pascakonflik Karang Taliwang Dan Monjok

Konflik sosial memiliki dua dimensi utama, yaitu dampak positif dan negatif, yang keduanya penting dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat. Menurut Lewis A. Coser, konflik tidak selalu bersifat merusak, tetapi dapat menjadi sarana konstruktif untuk memperkuat struktur sosial yang ada. Dalam konflik antara masyarakat Karang Taliwang dan Monjok tahun 2023, ditemukan berbagai dampak negatif maupun positif di dalamnya.

1. Dampak Negatif

a. Dampak Ekonomi

Konflik antara masyarakat Karang Taliwang dan Monjok sangat mengganggu aktivitas ekonomi warga. Masyarakat Karang Taliwang yang mayoritas bekerja sebagai pedagang ayam bakar dan pemilik rumah makan mengalami penurunan penghasilan karena masyarakat luar enggan datang ke wilayah tersebut. Hal serupa dialami masyarakat Karang Jero dan Monjok yang juga merasakan penurunan ekonomi akibat terbatasnya mobilitas dan akses menuju area konflik. Selain itu, pekerja proyek dan tukang tidak dapat bekerja optimal karena harus berjaga malam, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terhambat.

b. Dampak Psikologis

Konflik yang terus berulang menimbulkan dampak psikologis mendalam bagi masyarakat, baik yang terlibat langsung maupun tidak. Ketidakpastian dan ketegangan membuat warga merasa cemas, takut, dan saling curiga. Aktivitas sehari-hari menjadi terbatas, terutama pada malam hari. Peristiwa penembakan pada tahun 2023 semakin memperkuat rasa trauma dan menurunkan rasa aman di lingkungan sekitar.

c. Dampak terhadap Fasilitas Umum

Konflik juga berdampak pada layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Puskesmas di wilayah konflik sempat terganggu pelayanannya, sementara sekolah di sekitar lokasi sempat diliburkan demi keamanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik sosial berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan pelayanan masyarakat.

d. Cidera Fisik dan Korban Jiwa

Bentrokan menyebabkan beberapa warga mengalami luka-luka, menimbulkan dendam dan memperkuat kecurigaan antar kelompok. Hal ini meningkatkan potensi munculnya konflik lanjutan.

e. Retaknya Hubungan Sosial

Konflik membuat hubungan sosial antarwarga renggang. Rasa takut dan curiga menyebabkan masyarakat enggan bertegur sapa, sehingga keharmonisan sosial menurun.

f. Ancaman terhadap Norma dan Nilai Sosial

Tidak tertanganinya konflik dengan baik, seperti belum terungkapnya pelaku penembakan, menimbulkan persepsi bahwa kekerasan adalah hal biasa. Hal ini berpotensi melemahkan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

2. Dampak Positif

a. Memperkuat Solidaritas Kelompok

Kasus konflik ini membuat masyarakat menyadari pentingnya solidaritas sosial. Setelah beberapa warga Karang Taliwang ditangkap akibat konflik, masyarakat menjadi lebih rukun dan harmonis. Pengalaman atas banyaknya korban luka pada konflik sebelumnya juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya rasa kekeluargaan. Akibatnya, semangat gotong royong di lingkungan masyarakat semakin meningkat.

b. Menciptakan Paguyuban Baru

Pasca konflik, masyarakat membentuk berbagai paguyuban baru, salah satunya adalah Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan. Pembentukan paguyuban ini merupakan bentuk kesadaran kolektif untuk mencegah munculnya konflik serupa di masa mendatang.

c. Meningkatkan Kohesi Sosial

Terbentuknya komunitas baru setelah konflik menunjukkan adanya kemajuan sosial. Komunitas bulu tangkis di wilayah Karang Taliwang yang menjadi sarana mempererat hubungan antarwarga. Kegiatan ini sering melibatkan remaja Monjok Culik untuk bermain bersama, menjaga silaturahmi, dan menghindari gesekan yang dapat memicu konflik kembali terjadi.

d. Meningkatkan Kesadaran Sosial

Konflik juga menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial di lingkungannya, seperti ketidakadilan dan diskriminasi. Kesadaran ini mendorong masyarakat, khususnya kalangan remaja, untuk menjauhi perilaku negatif seperti narkoba, minuman keras, dan balap liar, serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban sosial.

Tipe Konflik Karang Taliwang dan Monjok Menurut Lewis A Coser

Lewis A. Coser membedakan dua tipe dasar konflik, yaitu realistik dan non-realistik. Konflik realistik muncul akibat kekecewaan terhadap tuntutan sosial yang tidak terpenuhi, frustrasi terhadap harapan yang gagal, serta keinginan memperoleh sesuatu yang dianggap adil. Konflik ini berfungsi sebagai sarana mencapai tujuan tertentu yang disepakati budaya pihak yang terlibat, baik antarindividu maupun antarkelompok (Nursantari, A. R., 2018).

Sebaliknya, konflik non-realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan bersifat ideologis, seperti konflik antar-agama, antar-etnis, dan antar-kepercayaan. Jenis konflik ini berfungsi menurunkan ketegangan serta mempertegas identitas kelompok, bahkan dapat melahirkan kekerasan dari sumber lain. Coser menegaskan bahwa kedua tipe konflik dapat muncul bersamaan sehingga menciptakan dinamika sosial yang kompleks (Coser, 1957).

1. Konflik Realistis

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa konflik antara masyarakat Karang Taliwang dan Monjok pada tahun 2023 di Kota Mataram berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian dalam menangani kasus penembakan terhadap warga Karang Taliwang. Rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti dinilai tidak jelas karena kondisi kamera yang usang, sehingga pelaku tidak teridentifikasi.

Hal ini menimbulkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat karena kasus tidak menemukan titik terang. Konflik tersebut tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat Monjok, melainkan terjadi antara warga Karang Taliwang dan aparat kepolisian, di mana tiga anggota polisi terluka dan beberapa warga diamankan karena membawa senjata tajam. Peristiwa ini mencerminkan bentuk kekecewaan terhadap aparat penegak hukum yang dianggap tidak mampu mengungkap pelaku penembakan.

Berdasarkan pandangan Lewis A. Coser, konflik ini termasuk konflik realistis, yaitu konflik yang berakar pada ketidakpuasan terhadap sistem sosial atau institusional yang dianggap tidak adil, serta muncul sebagai tuntutan untuk mencapai perubahan atau keadilan sosial.

2. Konflik Non-Realistis

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa konflik antara masyarakat Karang Taliwang dan Monjok tahun 2023 di Kota Mataram merupakan kelanjutan dari perseteruan lama dengan akar permasalahan yang berbeda setiap tahunnya. Namun ketegangan selalu meningkat pada masa pemilihan legislatif akibat isu provokatif dan penyebaran berita bohong (*hoaks*) oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menciptakan kambing hitam (*scapegoating*) untuk mengalihkan ketegangan sosial.

Menurut Lewis A. Coser, konflik non-realistis berfungsi melepaskan tekanan emosional dan memperkuat solidaritas internal melalui penciptaan musuh bersama. Dalam konteks ini, isu politik dijadikan sarana untuk menyalurkan ketegangan sosial yang lama terpendam, dan setelah pemilihan legislatif berakhir, intensitas konflik menurun.

Di dalam lingkungan masyarakat muncul stigma negatif seperti fenomena sosial Taliwang phobia dan Monjok phobia mencerminkan trauma sosial berupa rasa takut, curiga, dan keengganan masyarakat kedua kelompok untuk berinteraksi akibat pengalaman kekerasan masa lalu.

Konflik ini tidak didasari kepentingan politik nyata, melainkan dipicu oleh dorongan emosional dan pencarian pihak yang disalahkan, sehingga tergolong konflik non-realistis sebagaimana dijelaskan oleh Lewis A. Coser, yakni konflik yang tidak bertujuan rasional tetapi menjadi sarana ekspresi ketegangan sosial

Resolusi Konflik Karang Taliwang dan Monjok Tahun 2023

Menurut Lewis A. Coser, konflik tidak selalu bersifat negatif, melainkan dapat berfungsi memperkuat hubungan dan solidaritas antaranggota kelompok. Konflik yang terjadi membutuhkan penyelesaian agar tidak berkembang dan merusak struktur sosial. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui mekanisme katup penyelamat (safety valve), yaitu sarana untuk melepaskan ketegangan sosial dan menjaga keteraturan masyarakat.

Dalam konteks sosial, mekanisme ini dapat diwujudkan melalui forum negosiasi, mediasi oleh pihak ketiga, serta kegiatan sosial yang mampu menyalurkan emosi dan membangun kembali hubungan antarindividu. Konflik antara masyarakat Karang Taliwang dan Monjok pada tahun 2023 menjadi akhir dari perselisihan panjang yang telah berlangsung sejak tahun 2015. Konflik ini menimbulkan ketegangan dan ketidakstabilan sosial, sehingga memerlukan intervensi aktif dari pemerintah, aparat kepolisian, dan tokoh masyarakat. Melalui koordinasi yang terarah, berbagai langkah strategis diterapkan untuk menciptakan perdamaian.

1. Komunitas Bulutangkis

Komunitas Bulutangkis di wilayah Karang Taliwang, yang berfungsi sebagai wadah rekonsiliasi sosial dan penerapan mekanisme katup penyelamat sebagaimana dijelaskan oleh Lewis A. Coser. Komunitas ini mempertemukan pemuda dari kedua wilayah untuk berinteraksi melalui kegiatan olahraga yang rutin dilaksanakan setiap minggu. Kegiatan tersebut menjadi media komunikasi dan kerja sama yang efektif, mengurangi ketegangan, serta mencegah timbulnya kembali konflik antarkelompok.

2. Mediasi

Mediasi yang diprakarsai oleh pemerintah setempat dengan melibatkan tokoh adat, agama, pemuda, serta perwakilan masyarakat dari kedua pihak. Mediasi dilakukan secara bertahap mulai dari pengumpulan informasi hingga perumusan solusi yang disepakati bersama. Proses ini menciptakan ruang dialog yang kondusif dan menjadi upaya nyata dalam membangun kepercayaan antarmasyarakat (detik.com, 2022).

3. Musyawarah

Musyawarah ini melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah mencari solusi damai yang diterima bersama, mempererat

hubungan sosial, serta menanamkan kembali nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat (grandmedia.blog, 2024).

4. Perjanjian damai

Dokumen ini memuat kesepakatan bersama yang bersifat mengikat secara hukum sebagai bentuk komitmen kedua pihak untuk mengakhiri konflik secara permanen. Penyelesaian konflik tahun 2023 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena turut melibatkan aparat kepolisian sebagai pihak yang terdampak langsung.

Melalui serangkaian langkah tersebut, konflik antara masyarakat Karang Taliwang dan Monjok berhasil diselesaikan secara damai dan konstruktif. Proses ini tidak hanya mengembalikan stabilitas sosial, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kerja sama antarwarga sebagai wujud nyata dari fungsi positif konflik sebagaimana dikemukakan oleh Lewis A. Coser.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa faktor kembali terjadinya konflik antara Karang Taliwang dan Monjok menurut Lewis A. Coser terbagi menjadi dua, yaitu realistis dan non-realistik. Konflik realistis muncul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap aparat kepolisian dan sistem hukum yang dianggap tidak adil dalam menangani kasus penembakan warga Karang Taliwang. Konflik ini bersifat rasional karena berkaitan dengan tuntutan keadilan, kesetaraan hukum, serta upaya masyarakat menegaskan hak dan aspirasinya terhadap institusi negara yang kurang responsif. Konflik non-realistik muncul karena isu provokatif dan penyebaran berita bohong (hoaks) oleh oknum yang berperan sebagai kambing hitam (*scapegoating*) dengan memanfaatkan ketegangan lama antarwarga selama masa politik. Konflik ini menjadi sarana untuk meluapkan emosi dan memperkuat solidaritas kelompok melalui penciptaan musuh bersama, bukan untuk menyelesaikan masalah secara rasional. Di sisi lain, dalam hubungan antara masyarakat Karang Taliwang dan Monjok, terdapat suatu fenomena sosial yang dikenal dengan istilah Taliwang phobia dan Monjok phobia.

Konflik Karang Taliwang dan Monjok juga menimbulkan berbagai dampak pasca konflik, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya mencakup (1) penurunan aktivitas ekonomi lokal karena masyarakat enggan berinteraksi warga yang berkonflik. (2) Trauma psikologis terutama pada anak-anak yang takut beraktivitas di luar rumah. (3) Terganggunya Fasilitas umum menyebabkan terbatasnya akses dan kualitas

pelayanan kesehatan dan sekolah. (4) Cedera fisik dan korban jiwa yang menimbulkan dendam antar Masyarakat. (5) Retaknya hubungan sosial akibat meningkatnya rasa curiga. (6) Mengancam norma dan nilai sosial di masyarakat karena lemahnya penegakan hukum memperburuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.

Dampak positifnya mencakup meningkatnya solidaritas internal kelompok, munculnya paguyuban baru seperti pembentukan Linmas dan Pos Ronda, meningkatkan komunitas di dalam masyarakat seperti komunitas olahraga dan pemuda lintas wilayah yang berfungsi sebagai sarana pemulihan hubungan dan meningkatkan kesadaran sosial baru mengenai pentingnya menjaga perdamaian, menghindari provokasi, serta memperkuat peran masyarakat dalam mencegah kenakalan remaja dan kekerasan sosial.

Daftar Pustaka

- Sudarma, I. W., Armini, I., & Sumarheni, I. G. A. A. (2014). *Inventarisasi perlindungan karya budaya kuliner ayam taliwang Provinsi Nusa Tenggara Barat*. BPNB Bali
- Susan, N. (2014). *Pengantar sosiologi konflik*. Kencana.
- Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.
- Dodi, L. (2017). Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik (Konsekuensi Logis Dari Sebuah Interaksi di Antara Pihak Jamaah LDII Dengan Masyarakat Sekitar Gading Mangu-Perak-Jombang). *Al-'Adl*, 10(1), 104-124.
- Nursantari, A. R. (2018). Konflik sosial dalam novel O karya Eka Kurniawan (Kajian konflik sosial Lewis A. Coser). *Skripsi Universitas Negeri Surabaya*.
- Yaqinah, S. N. (2019). Resolusi Konflik Sosial melalui Pendekatan Komunikasi di Lingkungan Monjok dan Karang Taliwang Kota Mataram. *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 3(1), 1-20.
- Nirkomala. (2025, Juni 8). Pemkot Mataram berikan "trauma healing" siswa di wilayah konflik. ANTARA News Mataram. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2025 <https://mataram.antaranews.com/berita/303294/pemkot-mataram-berikan-trauma-healing-siswa-di-wilayah-konflik>
- Pertiwi, S. W. (2020). *Kemensos : 3.150 Desa di Indonesia Rawan Konflik Sosial*. Retrieved from Media Indonesia: Diakses pada 07 Oktober 2024 dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/365709/kemensos-3150-desa-di-indonesia-rawan-konflik-sosial>
- PPDB. (2009). *Konflik Sosial*. Retrieved from bpbdb.ntbprov.go.id: Diakses pada 31 Oktober 2024 dari <https://bpbdb.ntbprov.go.id/pages/konflik-sosial>
- Pratama, D. B. (2023, Oktober 11). *Eks anggota DPRD Mataram diperiksa terkait kasus panah Karang Taliwang*. Retrieved from Antara NTB: Diakses 18 September 2025 <https://mataram.antaranews.com/berita/301686/eks-anggota-dprd-mataram-diperiksa-terkait-kasus-panah-karang-taliwang>
- Suparta, I. K. (2024). *Polda NTB memberikan atensi daerah rawan konflik sosial pemilu 2024*. Retrieved from Antara NTB: Diakses pada 07 Oktober 2024 dari <https://mataram.antaranews.com/berita/322716/polda-ntb-memberikan-atsensi-daerah-rawan-konflik-sosial-pemilu-2024>